



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, hal tersebut dikarenakan memiliki dampak yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu-isu strategis ini juga dapat digali berdasarkan berbagai analisis terhadap sesuatu persoalan atau dari berbagai permasalahan yang teridentifikasi pada proses penyusunan rencana itu dibuat.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan realitas kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang telah direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Pemetaan masalah dalam pembangunan sangat diperlukan dalam proses penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih, yang kemudian akan menjadi salah satu input dalam merumuskan tujuan dan sasaran RPJMD. Identifikasi permasalahan pembangunan tersebut didapatkan dari data serta informasi yang ada pada Gambaran Umum Daerah dan evaluasi kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis terhadap masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pembangunan yang difokuskan kepada masing-masing aspek dan urusan, serta berbagai keinginan dari para pemangku kepentingan, maka permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut.



4.1.1. Permasalahan Pertanian dalam arti luas

Permasalahan pokok pada sektor pertanian dalam arti luas adalah Kontribusi sektor pertanian dalam pembangunan masih belum optimal. Berdasarkan data PDRB Kabupaten Pulang Pisau atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha, kontribusi tertinggi adalah sektor pertanian dalam arti luas diikuti sektor konstruksi dan sektor perdagangan. Namun jika dianalisis lebih dalam, kontribusi sektor pertanian dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan yakni mencapai 37,63 % pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 nilainya sebesar 37,22%. Dalam konteks ekonomi makro struktur ekonomi Kabupaten Pulang Pisau kuat di sektor produksi akan tetapi lemah di sisi promosi dan pemasaran, hal ini disebabkan secara umum masyarakat Kabupaten Pulang Pisau banyak bekerja di sektor produksi yang meliputi, tanaman pangan, hortikultura, perikanan dan perkebunan (pertanian dalam arti luas).

Beberapa permasalahan pada sektor pertanian dalam arti luas adalah sebagai berikut :

- a. Produktivitas hasil pertanian dalam arti luas masih rendah.
- b. Rendahnya adopsi dan inovasi teknologi pertanian dalam arti luas
- c. Masih rendahnya keterampilan/keahlian petani dan petugas
- d. Belum optimal pemberdayaan kelembagaan petani
- e. Keterbatasan Infrastruktur sarana dan prasarana Pertanian dalam arti luas.
- f. Meningkatnya pemanfaatan lahan pertanian produktif/potensial peruntukan lain
- g. Lemahnya permodalan petani
- h. Belum Optimalnya Pemasaran Hasil- Hasil Pertanian dalam arti luas.



4.1.2 Permasalahan Bidang Ekonomi Kerakyatan

Permasalahan Bidang Ekonomi kerakyatan adalah belum optimalnya kontribusi ekonomi kerakyatan dalam hal ini terkait dengan kelembagaan ekonomi masyarakat kondisi permasalahan tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Rendahnya jumlah koperasi aktif
- b. Sistem manajemen (tata kelola) dan kelembagaan koperasi dan UMKM yang perlu ditingkatkan
- c. Kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM yang masih rendah.
- d. Akses untuk pemodalan bagi koperasi dan UMKM yang masih rendah

Kemudian dalam aspek kesejahteraan yang dilihat dari jumlah penduduk miskin masih tidak konsisten capainnya, hal ini terlihat dari pertumbuhan jumlah penduduk miskin yang masih terjadi kenaikan dan penurunan dalam tahun yang bergantian.

4.1.3 Pendidikan

Permasalahan di Bidang Pendidikan yaitu masih rendahnya tingkat Pendidikan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau deskripsi terkait permasalahan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Dalam aspek Pendidikan salah satu menjadi sorotan pemerintah Kabupaten Pulang Pisau adalah berkaitan dengan rata-rata lama sekolah yang sampai pada tahun 2017 hanya 7,67 tahun, itu artinya di Kabupaten Pulang Pisau sebagian besar anak-anak hanya sekolah sampai pada kelas 2 SMP dan tidak mencapai lulus.

Kemudian permasalahan lain yang terjadi adalah masih rendahnya angka partisipasi kasar (APK) dan angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang Pendidikan SMP sederajat dan SMA sederajat. Pada tahun 2017, APK dan



APM jenjang Pendidikan SMP sederajat sebesar 77,83 persen dan 75,07 persen. Sedangkan pada jenjang SMA sederajat angka APK dan APM Tahun 2017 mencapai 81,19 persen dan 54,16 persen.

4.1.4 Kesehatan

Permasalahan di bidang Kesehatan masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2016 tentang Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian ibu, dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita.

a. Umur Harapan Hidup

Pencapaian positif di bidang kesehatan dapat dilihat dari trend kenaikan angka harapan hidup Kabupaten Pulang Pisau tahun 2017 yang mencapai 67,86 tahun, yang berarti bahwa bayi yang baru dilahirkan pada tahun 2016 akan memiliki peluang hidup hingga berumur 67-68 tahun dimana angka ini meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya (67,75 tahun).

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pulang Pisau semakin tahun semakin meningkat, namun jika dibandingkan dengan AHH Provinsi Kalimantan Tengah, AHH Kabupaten Pulang Pisau masih berada dibawah AHH Provinsi Kalimantan Tengah (tahun 2017 = 69,59). Adapun variable yang memberikan pengaruh signifikan adalah angka kematian bayi, persentase bayi berusia 0-11 bulan yang diberi ASI selama 4-6 bulan dan



persentase balita berusia 1-4 tahun yang mendapatkan imunisasi lengkap

b. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi (AKB) dalam satu tahun terakhir mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017 AKB meningkat menjadi 13,5 per 1.000 kelahiran hidup dibandingkan tahun sebelumnya (7,4 / 1.000 KH), penyebab utama meningkatnya AKB di Kabupaten Pulang Pisau adalah lahir premature.

c. Angka Kematian Ibu

AKI di Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2013 – 2017 berfluktuatif, angka tertinggi pada tahun 2015 dengan angka 294 per 1.000 kelahiran hidup. Kemudian mengalami penurunan drastis pada tahun 2015 dan mengalami peningkatan lagi pada tahun 2017, namun jika dibandingkan dengan target nasional berdasarkan renstra Kemenkes tahun 2015 -2019 sebesar 306 per 1.000 kelahiran hidup, AKI Kabupaten Pulang Pisau sudah mencapai target nasional.

Trend Angka Kematian Ibu di Kabupaten Pulang Pisau berfluktuatif disebabkan karena:

- Deteksi ibu hamil dan ibu nifas resiko tinggi masih rendah
- Kurangnya sistem rujukan
- Persalinan di fasilitas kesehatan yang masih rendah
- Masih adanya persalinan yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan

d. Status Gizi Masyarakat

Perkembangan masalah gizi di Indonesia semakin kompleks saat ini, selain masih menghadapi masalah kekurangan gizi, masalah kelebihan gizi juga menjadi persoalan yang harus kita tangani dengan serius, demikian juga yang terjadi di Kabupaten Pulang Pisau.



Prevalensi gizi buruk pada tahun 2017 sebesar 0,03 % Sedangkan prevalensi stunting di Kabupaten Pulang Pisau dari tahun 2016 sebesar 32,00 persen, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 35,45 persen dari total anak baduta (bayi dibawah 2 tahun). Mencermati hal tersebut, pendidikan gizi seimbang yang proaktif serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan di masyarakat.

e. Penyakit Menular

Untuk penyakit menular, di Provinsi Kalimantan Tengah prioritas masih tertuju pada penyakit HIV/AIDS, tuberculosis, malaria dan demam berdarah. Disamping itu Indonesia juga belum sepenuhnya berhasil mengendalikan penyakit *neglected diseases* seperti kusta, filariasis dan lain-lain.

Permasalahan penyakit menular antara lain rendahnya persentase penemuan pasien baru TBC BTA positif, selama periode 2013 – 2017 persentase penemuan pasien baru TBC BTA positif hanya berkisar antara 15 – 22 persen, berada jauh dibawah target nasional TB sebesar 70%.

f. Penyakit Tidak Menular

Penyakit tidak menular cenderung terus meningkat dan telah mengancam sejak usia muda. Transisi epidemiologis telah terjadi secara signifikan selama 2 dekade terakhir, yakni penyakit tidak menular telah menjadi beban utama, sementara beban penyakit menular masih berat juga. Indonesia sedang mengalami *double burdendiseases*, yaitu beban penyakit tidak menular dan penyakit menular sekaligus. Penyakit tidak menular utama meliputi hipertensi, diabetes melitus, kanker dan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK).



Untuk permasalahan penyakit tidak menular dapat digambarkan dengan beberapa indikator antara lain pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 – 59 tahun) yang masih rendah (55,85%), pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi (13,55%) dan pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Mellitus (14,76%). Rendahnya capaian indikator ini disebabkan oleh masih rendahnya jumlah posbindu PTM (Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular) sebagai upaya kesehatan berbasis masyarakat yang bersifat promotif dan preventif dalam rangka deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM Utama yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik. Deteksi dini harus dilakukan secara proaktif mendatangi sasaran, karena sebagian besar tidak mengetahui bahwa dirinya menderita penyakit tidak menular.

g. Kesehatan Jiwa

Permasalahan kesehatan jiwa sangat besar dan menimbulkan beban kesehatan yang signifikan. Gangguan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA juga berkaitan dengan masalah perilaku yang membahayakan diri, seperti bunuh diri. Dari data SPM Kesehatan tahun 2017, jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang ada di Kabupaten Pulang Pisau tahun 2017 sebanyak 99 orang dan semuanya sudah mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar. Prioritas untuk kesehatan jiwa adalah mengembangkan Upaya Kesehatan Jiwa Berbasis Masyarakat (UKJBM) yang ujung tombaknya adalah Puskesmas dan bekerja bersama masyarakat dalam mencegah meningkatnya gangguan jiwa masyarakat.



Selain permasalahan kesehatan di atas terdapat juga berbagai permasalahan yang masih perlu mendapatkan perhatian khusus, misalnya masalah kesehatan lingkungan, sumber daya manusia kesehatan (SDM-K), pembiayaan di bidang kesehatan dan lain sebagainya. Permasalahan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana kesehatan adalah masih belum terpenuhinya alat-alat kesehatan dilayanan kesehatan sesuai standar, dan belum semua desa terdapat Posbindu (total baru 23 posbindu di 99 desa/kelurahan). Kemudian dalam hal penanganan penyakit yang terjadi pada masyarakat, pada tahun 2017, 3 (tiga) besar kasus penyakit di Kabupaten Pulang Pisau adalah Inpeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) sebanyak 14.036 kasus, diikuti Hipertensi 9.677 kasus dan Penyakit pada system jaringan otot termasuk reumatik sebanyak 6.889 kasus.

4.1.5 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu jaringan jalan antar wilayah kecamatan dan perdesaan belum terintegrasi secara menyeluruh, kondisi permasalahan terbut dapat diperhatikan pada penjelasan sebagai berikut :

1. Permasalahan Bidang Jalan

- Panjang Jalan di Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2017 adalah 1.170,67 Km, dari seluruh jalan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau, hanya 419,10 Km (35,80 persen) dalam kondisi baik. Masih terdapat 751,57 Km (64,20 persen) Jalan di Kabupaten Pulang Pisau dalam kondisi belum baik.
- Jaringan jalan antar wilayah kecamatan dan perdesaan belum terintegrasi secara menyeluruh.



2. Permasalahan Bidang Irigasi

Persentase Irigasi Kabupaten Pulang Pisau Dalam Kondisi Baik pada tahun 2017 masih pada angka 28,09 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari luas irigasi kabupaten pulang pisau sebesar 20.917 Ha, hanya terdapat 5.875 Ha irigasi dalam kondisi baik atau 15.042 Ha (71,91 %) dalam kondisi rusak ringan sampai rusak berat.

3. Permasalahan Bidang Air Bersih

Rumah tangga pengguna air bersih adalah rumah tangga yang memanfaatkan air bersih untuk air minum dalam memenuhi kebutuhan hidup anggota rumah tangga. Ketersediaan dalam jumlah cukup terutama untuk keperluan rumah tangga merupakan tujuan utama dari program penyediaan air bersih yang terus diupayakan oleh pemerintah. Sampai tahun 2017, Penduduk wilayah perkotaan dan pedesaan berakses Air Minum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017 sebesar 13.228 jiwa (10,54 %) dari total jumlah penduduk 125.484 jiwa. Hal ini menggambarkan masih terdapat sebesar 112.256 jiwa (89,46 %) penduduk kabupaten pulang pisau yang belum terakses air minum.

4. Permasalahan Bidang Kelistrikan

Listrik merupakan salah satu kebutuhan rumah tangga maupun industri baik untuk penerangan maupun penunjang berbagai peralatan elektronik dan mesin-mesin. Berdasarkan data tahun 2017, Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Di Kabupaten Pulang Pisau mencapai 93,59 persen. Berdasarkan data tersebut, terdapat 6,41 persen (2.066 rumah tangga) yang belum mendapat akses terhadap penyediaan listrik.



4.1.6 Perumahan dan Permukiman

Permasalahan di Bidang Perumahan dan Permukiman masih tingginya kawasan tidak layak huni, kondisi permasalahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pada tahun 2017, luas kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Pulang Pisau mencapai 96.648,31 Ha. Dari luasan kawasan permukiman tersebut, untuk permukiman layak huni tahun 2017 mencapai 65.962,47 Ha atau 68,25 persen. Berdasarkan data tersebut terdapat 30.685,84 Ha atau 31,75 persen luas kawasan permukiman di Kabupaten Pulang Pisau yang masuk kriteria kawasan tidak layak huni.

4.1.7 Sosial

Permasalahan di Bidang Sosial masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial

Kondisi sosial suatu daerah dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya adalah melihat jumlah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di masyarakat. Berdasarkan data yang tersedia pada tahun 2016 secara umum terlihat bahwa jumlah kelompok PMKS yang memperoleh bantuan sosial di kabupaten Pulang Pisau sebanyak 540 orang, sedangkan di tahun 2017 turun menjadi 148 orang.

4.1.8 Ketenagakerjaan

Permasalahan bidang Ketenagakerjaan adalah rata-rata angkatan kerja Kabupaten Pulang Pisau berada di Pendidikan tingkat menengah atas, hal ini tentunya terkait dengan capaian tingkat Pendidikan, realitas yang ada juga ditunjukkan dengan keberadaan tenaga kerja dari daerah lain bahkan luar Kalimantan.



Tenaga kerja merupakan salah satu unsur dalam penilaian kondisi ekonomi di suatu daerah. Dari data yang ada menunjukkan bahwa persentase jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2013 sebanyak 2,40 persen turun menjadi 1,62 persen pada tahun 2017.

4.1.9 Kependudukan

Permasalahan Bidang Kependudukan adalah tingkat penyebaran penduduk antar kecamatan yang tidak merata, kondisi perkembangan kependudukan di Kabupaten Pulang Pisau dapat diperhatikan pada penjelasan sebagai berikut :

Peningkatan jumlah penduduk yang terjadi hampir setiap tahun pada kurun waktu 4 tahun terakhir, dimana pada tahun 2013 jumlah penduduk mencapai 123.278 jiwa (63.699 laki-laki dan 58.812 perempuan), sedangkan pada tahun 2017 jumlah penduduk 126.181 jiwa (65.688 laki-laki dan 60.493 perempuan) . Dari pertumbuhan jumlah penduduk di atas Penduduk terbanyak pada 2017 berada di Kecamatan Kahayan Hilir sebanyak 27.812 jiwa atau 22,04 persen, diikuti dengan Kecamatan Maliku dan Kahayan Kuala masing-masing sebesar 19,02 persen dan 16,41 persen. Sedangkan Kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Kahayan Tengah yaitu sebanyak 7.737 jiwa atau 6,13 persen.

Jika ditinjau berdasarkan kelompok umur, di Kabupaten Pulang Pisau jumlah penduduk paling tinggi berasal dari kalangan umur 10-14 tahun yaitu 11.609 jiwa diikuti kalangan umur 0-4 tahun yaitu 11.355 jiwa. Berdasarkan data tersebut terdapat selisih 254 jiwa antara umur 10-14 tahun dengan umur 0-4 tahun. Fenomena ini pada jangka pendek mungkin tidak akan berdampak, namun pada jangka panjang perlu diperhatikan karena pada beberapa puluh tahun kedepan penduduk yang usia 0-4 tahun akan



berada pada masa produktif hal ini menjadi keuntungan dan diperlukan kebijakan khusus untuk mengaturnya. Setelah itu penduduk tersebut akan mengalami lanjut usia dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga memerlukan pula kebijakan khusus untuk menangani fenomena “*old aging*” tersebut.

Terlepas dari data tersebut jika kita pelajari lebih lanjut pada tahun 2017 ternyata jumlah penduduk lanjut usianya pun cukup banyak yakni usia 75+ tahun sebanyak 1.591.

4.1.10 Pariwisata

Permasalahan di Bidang Pariwisata adalah menurunnya jumlah kunjungan wisata tentunya hal ini terkait dengan tata kelola kepariwisataan , untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan penjelasan sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan urusan pariwisata masalah pada tahun 2014 jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Pulang Pisau mencapai 4.266 orang. Pada tahun 2016 terjadi penurunan jumlah kunjungan menjadi 2.492 orang. Hal ini disebabkan masih belum optimalnya tata kelola pada masing-masing objek wisata yang terdapat di Kabupaten Pulang Pisau. Hal ini dapat dilihat dari kualitas infrastruktur yang masih belum memadai, penyediaan sarana pendukung yang belum terintegrasi serta belum optimalnya sinergisitas perencanaan sektor pariwisata antar SOPD.

4.1.11 Kehutanan

Kehutanan saat ini menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, dimana wilayah yang ada hampir sebagian besar merupakan wilayah hutan. Namun permasalahan yang dihadapi adalah semakin meluasnya hutan dengan lahan kritis yang terjadi, dimana pada tahun



2014 dan 2015 luas total hutan dan lahan kritis mencapai 300 Ha, sedangkan luas hutan dengan lahan kritis 150 Ha sehingga masih terdapat 50 persen luas total hutan dan lahan kritis yang belum terehabilitasi. Untuk data tahun 2016 dan tahun 2017 ketersediaan data tidak tersedia mengingat peralihan kewenangan kehutanan dari Kabupaten ke provinsi.

4.1.13 Perhubungan

Permasalahan di Bidang Perhubungan adalah moda transportasi penumpang barang dan jasa yang menghubungkan pulang pisau dengan pulau jawa belum optimal diwujudkan kondisi terkini hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Problematis yang dihadapi dalam urusan perhubungan adalah masih belum terdapatnya terminal Kelas A dan B, saat ini di Kabupaten Pulang Pisau baru terdapat terminal Kelas C dan jumlahnya dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 berjumlah 4 buah terminal.

Tidak hanya itu, sektor pelabuhan laut juga memerlukan perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mengingat telah beroperasionalnya pelabuhan Sungai Tunggul Kecamatan Kahayan Kuala sebagai moda transportasi penumpang, barang dan jasa dengan kawasan Pulau Jawa sekaligus sebagai penghubung bagi Kalimantan Tengah. Sejalan dengan program nawacita mewujudkan program tol laut maka pengembangan infrastruktur berupa akses jalan menuju pelabuhan beserta sarana pendukung lainnya perlu menjadi perhatian dari Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.



4.1.14 Komunikasi dan Informatika

Permasalahan Bidang Komunikasi dan Informatika adalah rendahnya akses pelayanan dan kinerja pembangunan daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK), kondisi permasalahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Salah satu indikator yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika di Kabupaten Pulang Pisau adalah tersedianya media informasi dalam bentuk website daerah yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder dalam rangka mencari informasi tentang potensi dan hasil-hasil pembangunan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Website Kabupaten Pulang Pisau dapat diakses di www.pulangpisaukab.go.id.

4.1.15 Kebudayaan

Permasalahan di Bidang Kebudayaan adalah kearifan lokal budaya belum mewarnai aktivitas pembangunan

Permasalahan yang sedang dihadapi sektor kebudayaan di Kabupaten Pulang Pisau tahun 2017 adalah masih belum optimalnya pengelolaan potensi-potensi budaya yang ada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Sampai dengan tahun 2017, jumlah kegiatan atau event kebudayaan yang dilaksanakan dalam setiap tahun mulai tahun 2013 hanya berjumlah 1 kali yaitu festival budaya daerah yang dilaksanakan pada setiap peringatan HUT Kabupaten dan HUT Republik Indonesia. Hal ini menggambarkan pengelolaan potensi-potensi kebudayaan yang bersifat kearifan lokal diantaranya Budaya Tiwah, Ritual Manyanggar dan potensi sektor budaya lainnya di Kabupaten Pulang Pisau masih belum optimal.

Selain potensi budaya diatas, di Kabupaten Pulang Pisau juga terdapat beberapa situs dan kawasan cagar budaya



yang dilestarikan. Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 jumlah situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Pulang Pisau berjumlah 4 dari total 16 situs dan kawasan cagar budaya yang ada. Hal ini menggambarkan masih terdapat 12 situs dan kawasan cagar budaya yang belum dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui OPD teknis.

4.1.16 Kearsipan

Kearsipan daerah belum terkelola dengan baik. Pengelolaan arsip secara baku merupakan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kondisi yang ada pada Kabupaten Pulang Pisau saat ini seluruh SOPD masih belum ada yang menerapkan arsip secara baku. Dari 38 SOPD yang ada belum satu pun yang sudah menerapkan arsip secara baku tersebut.

4.1.17 Kebakaran Hutan dan Lahan

Permasalahan utama dalam antisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan antara lain sebagai berikut :

1. Sarana prasana penunjang antisipasi kebakaran pada hutan dan lahan utamanya lahan gambut berupa sumur bor dan sekat kanal masih belum terkelola secara menyeluruh oleh pemerintah daerah.
2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
3. Topografi wilayah Pulang Pisau yang sebagian besar lahan gambut meningkatkan potensi kebakaran lahan ketika terjadi musim kemarau.



4.2. Isu Strategis

4.2.1. Kebijakan Internasional

Sebagai bagian dari masyarakat internasional tentunya dinamika yang terjadi secara global sangatlah penting untuk diperhatikan, karena hal tersebut sering memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan perkembangan daerah, terutama kaitannya dengan pembangunan selama 5 tahun yang mendatang. Dari hasil analisis didapatkan bahwa isu yang sedang berkembang secara global adalah sebagai berikut:

1. Isu Lingkungan Hidup

Kesadaran masyarakat mengenai isu lingkungan hidup yang dipicu oleh berbagai kejadian diberbagai pelosok penjuru dunia berupa kebakaran hutan, bencana alam banjir, longsor, gempa bumi dan sebagainya yang banyak dikaitkan dengan gejala *global warming* dan perubahan iklim dunia, sehingga menimbulkan tumbuhnya perhatian yang besar dari berbagai kelompok masyarakat dunia untuk semakin memperhatikan untuk menjaga serta memelihara planet bumi sebagai akibat dari degradasi lingkungan yang mengglobal.

2. Perkembangan Ekonomi

Kondisi ekonomi global saat ini dan kedepannya akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perekonomian Indonesia. Hal tersebut karena dipengaruhi oleh:

- Proses ekonomi global yang saat ini diperkirakan akan berlangsung secara moderat.
- Pergeseran pusat ekonomi dunia yang diperkirakan terutama dari kawasan Eropa-Amerika ke kawasan Asia Pasifik.
- Tren perdagangan global kedepannya tidak saja hanya dipengaruhi oleh peranan perdagangan barang.



- Harga komoditas secara umum diperkirakan menurun, namun harga produksi manufaktur dalam tren meningkat.
 - Semakin meningkatnya hambatan non-tarif di Negara tujuan ekspor.
 - Implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 yang sudah dimulai tanggal 31 Desember 2015.
 - Pergeseran fenomena kerja sama ekonomi ke arah plurilateral dan mega blok.
3. Perkembangan Bidang Teknologi Transportasi dan Informatika

Pada saat ini semakin berkembang pesatnya teknologi transportasi dan informasi mengakibatkan jarak baik dari pengertian ruang maupun waktu menjadi relatif tidak ada artinya lagi. Dengan teknologi transportasi setiap orang dan barang dapat berpindah dengan cepat secara mudah demikian pula berbagai kejadian diseluruh pelosok dunia bahkan diluar bumi ini pun dapat diketahui oleh hampir setiap orang secara transparan dan real time. Perkembangan ini menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia dan hubungan antar negara dan bangsa di dunia termasuk didalamnya tatanan budaya, perekonomian dan hubungan antar manusia di dunia global.

4. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Dengan berakhirnya pencapaian MDGs terdapat pula indikator baru yang harus dilaksanakan oleh setiap Negara maupun daerah guna meningkatkan pencapaian upaya-upaya kemiskinan, kelaparan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi, kesenjangan dll.



4.2.2. Kebijakan Nasional

Dalam penentuan isu strategis di tingkat nasional masih diwarnai oleh kebijakan nasional, hal tersebut dimaksudkan agar perencanaan yang disusun pusat dan daerah akan sinkron dan menjamin tujuan pembangunan nasional telah mendukung dan dilaksanakan oleh daerah sehingga penentuan arah kebijakan Kabupaten Pulang Pisau sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh nasional. Dalam kaitannya dengan hal tersebut sesuai RPJMN tahun 2015-2019, kebijakan yang menjadi prioritas nasional terdapat dalam 7 misi dan 9 agenda prioritas yang kemudian dikenal dengan istilah NAWACITA. Adapun 7 misi Pemerintah yang dimaksud meliputi:

1. Keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritime;
4. Kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Bangsa berdaya saing;
6. Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sedangkan 9 agenda prioritas Pemerintah (NAWACITA) meliputi:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.



2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selain amanat nawa cita sebagai agenda pembangunan kurun waktu 2015-2019, RPJMD juga mengamanatkan beberapa hal, antara lain target pembangunan nasional berupa: akses air minum 100%, kawasan permukiman kumuh perkotaan 0 Ha dan akses sanitasi layak 100% (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan). Sebagai upaya mempercepat terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional, maka Pemerintah Daerah harus mensinergikan segala potensi dan sumberdaya untuk mendukung pencapaian amanat tersebut.

Selain itu peerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menjadi penentu kebijakan di daerah. Dalam aturan tersebut menjelaskan tentang konsep



desentralisasi dalam pemerintahan daerah selalu berkaitan dengan penyerahan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Terkait dengan hal itu, dalam rangka perencanaan pembangunan desa dan guna mengurangi kesenjangan antara kota dan desa, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Makna yang terkandung dari pembangunan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang tentang Desa memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah desa untuk melakukan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan keuangan desa dalam rangka pembangunan di desa.

Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat untuk diatur dalam susunan pemerintahan. Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self-government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.



Selain itu terdapat juga kebijakan Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun adalah salah satu agenda prioritas pembangunan pendidikan, yang akan dilaksanakan dalam periode 2015-2019. Wajar 12 Tahun diletakkan dalam konteks penyelenggaraan pendidikan untuk membekali peserta didik dengan empat kemampuan: (i) *learning to know*, (ii) *learning to do*, (iii) *learning to be*, dan (iv) *learning to live together*. Pelaksanaan Wajar 12 Tahun, antara lain, ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan pengentasan kemiskinan.

Dalam tes internasional seperti dalam *Programme for International Student Assessment* (PISA) dan *Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS), hasil belajar siswa Indonesia juga tidak mengembirakan. Nilai rata-rata siswa Indonesia dalam PISA 2012 hanya 396, jauh lebih rendah dari nilai rata-rata negara OECD.

Selanjutnya kebijakan nasional yang akan berdampak kepada daerah juga berkaitan dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan merupakan prasyarat dalam meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan.

Capaian dalam peningkatan kapasitas kelembagaan PUG di tingkat nasional dan daerah sampai tahun 2013 adalah telah disahkannya Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG), yang dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan Stranas PPRG untuk kementerian/lembaga/pemerintah daerah, melalui Surat Edaran bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan



Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2012.

Sementara itu capaian dalam peningkatan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, antara lain telah disusunnya berbagai peraturan perundang-undangan serta peraturan teknis lainnya. Walaupun banyak kemajuan yang telah dicapai terkait kelembagaan PUG, terutama dalam hal kerangka hukum dan kebijakan seperti diuraikan di atas, namun kapasitas kelembagaan PUG masih belum optimal dalam mendukung proses pengintegrasian PUG dalam berbagai bidang pembangunan.

4.2.3. Teknokratis RPJMN Tahun 2020-2024

Periode RPJMN tahun 2015-2019 akan berakhir pada tahun 2019. Saat ini pemerintah telah menggodok rancangan Teknokratis RPJMN periode 2020-2024 dengan mengacu kepada RPJPN periode 2005-2025. Dalam rangka sinergisitas perencanaan pusat dan daerah, maka pemerintah daerah harus memperhatikan rancangan teknokratis RPJMN 2020-2024 untuk diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah.

Sasaran pokok pembangunan didalam RPJPN Tahun 2005-2025 untuk periode RPJMN 2020-2024 adalah **“ Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”**. Berdasarkan sasaran tersebut, pemerintah pusat telah menetapkan Tema rancangan teknokratis RPJMN 2020-2024



adalah **“Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan”**.

Terdapat 5 (lima) isu strategis yang akan diangkat pada periode 2020-2024 yaitu :

1. Pembangunan antar wilayah masih timpang
2. Pusat pertumbuhan wilayah masih belum optimal
3. Pelayanan dasar belum optimal
4. Daya saing daerah masih relatif rendah
5. Pemanfaatan ruang dan Urbanisasi kurang terkendali.

Berdasarkan isu strategis diatas, ditetapkan 12 (dua belas) arah kebijakan pembangunan yaitu :

1. Pengembangan perdesaan, wilayah terdepan, terluar dan tertinggal
2. Peningkatan sarana dan prasarana sosial-ekonomi di KTI dan daerah tertinggal lainnya.
3. Peningkatan konektivitas antar wilayah
4. Optimalisasi dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (KEK, KI, KPBPB, KSPN)
5. Peningkatan tata kelola dan kapasitas Pemda dan Pemdes (kelembagaan, keuangan dan SDM Aparatur)
6. Percepatan pemenuhan pelayanan dasar untuk masyarakat miskin terutama di daerah tertinggal
7. Peningkatan inovasi pemerintahan daerah
8. Peningkatan kemudahan perizinan
9. Pengembangan kerja sama antar-daerah, kolaborasi multipihak serta meningkatkan kualitas SDM
10. Penataan pola hubungan Pusat dan Daerah
11. Peningkatan peran kota kecil-menengah dan pengendalian kota besar metropolitan
12. Penegakan penataan ruang yang berbasis kebencanaan dan kepastian hukum hak atas tanah.



4.2.4. Telaahan terhadap RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021

Untuk mengetahui dinamika Provinsi dilakukan dengan melakukan telaahan terhadap RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021. Beberapa isu strategis yang menjadi isu pembangunan 5 (lima) tahun di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, disajikan sebagai berikut:

1. Percepatan penyelesaian permasalahan kawasan hutan dalam RTRWP Kalteng, pengelolaan SDA dan LH, penanganan dan mitigasi bencana kebakaran lahan, hutan dan kebun.
2. Peningkatan Kualitas SDM dan Tenaga Kerja berdaya saing.
3. Pengembangan *green economy* dan *green government* dalam realisasi pembangunan daerah.
4. Pemerataan kesejahteraan masyarakat.
5. Restrukturisasi sektor pertanian berbasis teknologi ramah lingkungan.
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah.
7. Penggalan potensi sumber daya alam melalui optimalisasi investasi.
8. Mewujudkan *Good Governance* secara menyeluruh.

Sementara itu untuk visi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah periode 2016-2021 adalah;

“Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religious, Kuat, Amanah dan Harmonis)”

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, ditempuh dengan 8 misi sebagai berikut:

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi.
2. Pengelolaan Infrastruktur.



3. Pengelolaan Sumber Data Air, Pesisir, dan Pantai.
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan ekonomi, Pengentasan Kemiskinan.
5. Pemantapan tata Kelola Pemerintah Daerah.
6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata.
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam.
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 terdapat beberapa kegiatan strategis nasional yang tertuang didalam RPJMN 2015-2019 yang dilaksanakan dengan melibatkan Kabupaten Pulang Pisau yaitu antara lain :

1. Pembangunan Jalur KA Kuala Kurun – Rabambang – Palangka Raya – Pulang Pisau – Batanjung (Kuala Kapuas)
2. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Perawan di Kabupaten Pulang Pisau
3. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Petanak, Kabupaten Pulang Pisau

Kabupaten Pulang Pisau sendiri masuk kedalam Zona 2 (tengah) dalam Pengembangan Potensi Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dengan potensi pada sektor Pertanian Tanaman Pangan, Perikanan Darat dan Pariwisata dengan konsentrasi pengembangan potensi pada budidaya perikanan sungai dan Taman Nasional Sebangau.

4.2.5. Telaahan terhadap RTRW Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2035

Penataan ruang wilayah provinsi Kalimantan Tengah bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah Kalimantan Tengah berbasis pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri, serta sebagai lumbung energi



dan lumbung pangan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035, kebijakan penataan ruang Provinsi Kalimantan Tengah meliputi :

- a. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;
- b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;
- c. Perwujudan kawasan agribisnis dan agroindustri dalam rangka mendukung pengembangan pertanian;
- d. Perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan;
- e. Perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi;
- f. Pencegahan dampak negatif kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama akibat kegiatan pertanian dan energi;
- g. Pengembangan potensi perekonomian melalui penetapan kawasan strategis provinsi; dan
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Kemudian jika ditelaah lebih lanjut berkaitan tentang RTRW Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau mendapatkan beberapa kawasan strategis yakni pada;

1. Kawasan Pengembangan Lahan Gambut (PLG)
2. Kawasan Pertanian Berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan DR. Pasang Surut, DR. Non Pasang Surut, DR. Lebak
3. Kawasan pertanian lahan gambut
4. Kawasan pengembangan Peternakan berupa kawasan Peternakan ruminansia dan non ruminansia



5. Kawasan perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet, lada dan kakao)
6. Kawasan terpadu Industri, pelabuhan, petikemas dan pergudangan, serta simpul transportasi darat, laut dan udara berupa KSP Pangkalan Bun – Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat, KSP Sampit - Bagendang di Kabupaten Kotawaringin Timur, KSP Batanjung - Kapuas di Kabupaten Kapuas, Sigintung di Kabupaten Seruyan dan Bahaur di Kabupaten Pulang Pisau
7. Kawasan strategis ekonomi sektor unggulan agropolitan
8. Kawasan Strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan
9. Kawasan strtategis dari sudut kepentingan fungs sosial budaya berupa rumah adat dan kawasan pahewan
10. Kawasan strategis sekitar kawasan adat masyarakat terutama bagi umat hindu kaharingan;
11. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa kawasan berpotensi pengembangan sumber daya energid an perikanan di kawasan andalan laut.
12. Kawasan strategis daerah aliran sungai meliputi DAS Barito, DAS Kapuas, DAS Kahayan, DAS Pulang Pisau, DAS Seruyan, dan DAS Mentaya, DAS Jelai, DAS Arut, DAS Lamandau, DAS Kumai dan DAS Sebangau.
13. Kawasan Strategis Perlindungan Keanekaragaman Hayati (Taman Nasional Sebangau, Pahewan Kalawa, Danau Sabuah di Kabupaten Pulang Pisau)

4.2.6. Dinamika Daerah (Kabupaten)

4.2.6.1. Telaahan RPJPD Kabupaten Pulang Pisau

Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulang Pisau



Tahun 2006 – 2025; merupakan pedoman pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun. Atas dasar hal tersebut pembangunan jangka panjang Kabupaten Pulang Pisau memiliki visi :

“Kabupaten Pulang Yang Maju Dan Menjadi Pintu Gerbang Perekonomian Kalimantan Tengah Bagian Timur Yang Berwawasan Lingkungan”

Dalam upaya mewujudkan Kabupaten Pulang Pisau **Kabupaten Pulang Yang Maju Dan Menjadi Pintu Gerbang Perekonomian Kalimantan Tengah Bagian Timur Yang Berwawasan Lingkungan** tersebut, maka ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara berkelanjutan, sehingga memiliki daya saing baik dalam pada tingkat regional, nasional maupun global, memiliki etos kerja tinggi, meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap berpijak pada landasan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tidak tercabut dari akar budaya setempat.
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dengan berbasis pada agribisnis dan agroindustri, menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan khususnya dalam pelayanan jasa dan perdagangan; keberpihakan kepada ekonomi rakyat, kelompok dan wilayah yang masih lemah, serta menanggulangi kemiskinan secara sistematis.



3. Meningkatkan pembangunan prasarana transportasi termasuk pembangunan Pelabuhan yang terintegrasi dengan pembangunan Kereta Api di Kalimantan Tengah, sehingga Kabupaten Pulang Pisau menjadi pintu gerbang utama perdagangan Kalimantan Tengah kawasan Timur.
4. Mendorong kehidupan masyarakat yang tertib, taat hukum, dinamis dan demokratis, menghargai nilai-nilai luhur agama dan budaya lokal sebagai bagian dari budaya nasional.
5. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.
6. Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih, meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah; melakukan pembenahan struktur kelembagaan serta menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dengan berorientasi pada masyarakat), sesuai dengan kebutuhan masyarakat, selaras dengan budaya setempat, berwawasan lingkungan dan tidak diskriminatif.

Perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Pulang Pisau saat ini memasuki tahap 3 Rencana Program Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulang Pisau 2006-2025 memiliki isu strategis sebagai berikut:

1. Masih belum meratanya kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah



2. Belum terciptanya Kesesuaian Tata Ruang Wilayah Yang Berkualitas
3. Belum tertatanya Lingkungan Pemukiman
4. Masih rendahnya produktivitas Hasil Sumber Daya Alam
5. Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan belum optimal
6. Belum seimbangnya pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup
7. Kualitas pendidikan masyarakat belum merata
8. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat pulang pisau
9. Pengembangan ekonomi masyarakat belum berpihak kepada pengembangan koperasi dan UMKM
10. Tata kelola Pemerintahan Yang Baik belum optimal
11. Masih rendahnya peranan organisasi keagamaan dalam pembangunan
12. Masih rendahnya peranan sosial budaya masyarakat dalam pembangunan
13. Masih rendahnya peranan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan

Untuk mencapai tujuan pembangunan seperti tersebut di atas, arah kebijakan pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pulang Pisau dalam periode ke-3 RPJPD Kabupaten Pulang Pisau 2005-2026 ini adalah sebagai berikut.



1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia.

Pembangunan pada hakekat adalah pembangunan sumberdaya manusia, karena itu peningkatan kualitas SDM memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan Kabupaten Pulang Pisau yang maju dan sebagai pintu gerbang perdagangan, sehingga mampu bersaing dalam era globalisasi.

Peningkatan kualitas SDM yang meliputi Pembangunan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan generasi muda serta penguasaan IPTEK, merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas SDM, yang erat kaitannya dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan.

- a. Pembangunan pendidikan **diarahkan** untuk meningkatkan harkat, martabat dan kualitas manusia sehingga mampu bersaing dalam era global dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat dan tanpa diskriminasi. Pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis dan jenjang perlu disediakan secara bermutu dan terjangkau disertai dengan pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar. Penyediaan pelayanan pendidikan sepanjang hayat sesuai perkembangan iptek perlu terus didorong untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas penduduk Indonesia termasuk untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi



penduduk usia produktif yang jumlahnya semakin besar.

- b. Pembangunan kesehatan **diarahkan** untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan iptek, dan globalisasi dengan semangat kemitraan, dan kerjasama lintas sektor. Pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba dan napza perlu disosialisasikan terutama kepada generasi muda melalui berbagai media maupun penyuluhan-penyuluhan. Dengan upaya yang sama, pencegahan penyebaran virus HIV/AIDS juga perlu dilakukan.
- c. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak **diarahkan** pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, serta kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan; penurunan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender di tingkat nasional dan daerah, termasuk ketersediaan data dan statistik gender.



- d. Pembangunan pemuda **diarahkan** pada peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik. Di samping itu, pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat.
- e. Pembangunan iptek **diarahkan** untuk penciptaan dan penguasaan ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan, serta pengembangan ilmu sosial dan humaniora untuk menghasilkan teknologi dan pemanfaatan teknologi hasil penelitian, pengembangan, dan rekayasa bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan daya saing melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas iptek yang senantiasa berpedoman pada nilai agama, nilai budaya, nilai etika, kearifan lokal, serta memperhatikan sumber daya dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

2. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dengan berbasis pada agribisnis dan agro industri.

Kemampuan perekonomian Kabupaten Pulang Pisau sangat ditentukan oleh daya saing sektor pertanian. Untuk memperkuat daya saing tersebut dan sesuai dengan potensi wilayah maka pembangunan jangka panjang perekonomian Kabupaten Pulang Pisau yang **diarahkan** untuk:



- a. Memperkuat perekonomian daerah yang berbasis pada agribisnis dan agroindustri sebagai motor penggerak utamanya yang didukung oleh keunggulan sektor pendukung terkait dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan publik dalam bentuk kebijakan dan fasilitasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait;
- b. Menyediakan SDM berkualitas dan berkompetensi tinggi dalam rangka mendukung agrobisnis dan agroindustri dan perdagangan agar dapat berkembang lebih pesat;
- c. Menciptakan iklim investasi yang kondusif khususnya untuk peluang-peluang penanaman modal di sektor jasa dan perdagangan;
- d. Membangun sistem, kelembagaan, dan infrastruktur perekonomian yang maju serta melakukan reformasi perijinan dan kemudahan berinvestasi serta dukungan insentif perpajakan dan retribusi daerah.
- e. Perekonomian dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang memperhatikan kepentingan masyarakat sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dengan mengutamakan kelompok masyarakat yang masih lemah.



- f. Mendorong ekspor produk-produk lokal untuk mendukung perekonomian rakyat agar mampu memaksimalkan manfaat sekaligus meminimalkan efek negatif dari proses integrasi dengan dinamika globalisasi.
- g. Pengembangan UKM dan Koperasi diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang semakin berbasis iptek, dan berdaya saing dengan produk impor khususnya dalam penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian domestik. Untuk itu, pengembangan UKM dan koperasi dilakukan melalui peningkatan kompetensi kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat. Pengembangan UKM secara nyata akan berlangsung terintegrasi dalam perkuatan basis produksi agrobisnis dan agroindustri dan daya saing, percepatan alih teknologi, dan seiring dengan peningkatan kualitas SDM.



3. Meningkatkan pembangunan prasarana transportasi dan pembangunan Pelabuhan yang terintegrasi dengan pembangunan Kereta Api di Kalimantan Tengah.

Pembangunan prasarana transportasi **diarahkan** untuk:

- a. mempercepat dan memperlancar pergerakan muatan barang (khususnya sumberdaya alam) melalui integrasi pembangunan pelabuhan di bagian muara Sungai Kahayan (di desa sungai Tunggul) dengan pembangunan rel Kereta Api. Wilayah jangkauan rel kereta api ini meliputi kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Bartio Selatan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kota Palangka Raya, terus ke Pelabuhan di Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau;
- b. mendorong transaksi perdagangan sebagai sumber pergerakan orang, barang, dan jasa yang menjadi pangsa pasar bisnis transportasi melalui *political trading* yang saling menguntungkan, sehingga Kabupaten Pulang Pisau dapat berperan sebagai pintu gerbang (inlet dan outlet) utama perdagangan bagi Kalimantan Tengah kawasan timur.
- c. menciptakan jaringan pelayanan secara inter dan antarmoda angkutan melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi, serta diikuti dengan pemanfaatan menyelaraskan semua peraturan



- perundang undangan baik yang mencakup investasi maupun penyelenggaraan jasa transportasi untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkenan;
- d. mendorong seluruh *stakeholders* untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, dan pengoperasiaannya;
 - e. mempertahankan keberpihakan pemerintah sebagai regulator terhadap pelayanan kepada masyarakat;

4. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.

Bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Jasa-jasa lingkungan memberikan kenikmatan, keindahan alam dan udara yang bersih bagi kehidupan manusia. Sehubungan dengan itu, pembangunan SDA dan lingkungan hidup diarahkan untuk:

- a. menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan dalam upaya mewujudkan Kabupaten Pulang Pisau yang maju dan menjadi pintu gerbang perdagangan di Kalimantan Tengah,
- b. Diterapkannya prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan



- wilayah menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan.
- c. Pengelolaan SDA terbarukan yang sudah berada dalam kondisi kritis, diarahkan pada upaya untuk merehabilitasi dan memulihkan daya dukungnya, dan selanjutnya diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan sehingga tidak semakin merusak dan menghilangkan kemampuannya sebagai modal bagi pembangunan yang berkelanjutan.
 - d. Pengelolaan SDA tak terbarukan diarahkan untuk tidak dikonsumsi secara langsung, melainkan diperlakukan sebagai input untuk proses produksi berikutnya yang dapat menghasilkan nilai tambah yang optimal. Outputnya diarahkan untuk dijadikan sebagai kapital kumulatif. Hasil atau pendapatan yang diperoleh dari kelompok SDA ini diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dengan diinvestasikan pada sektor-sektor lain yang produktif, juga untuk upaya reklamasi, konservasi, dan memperkuat pendanaan dalam pencarian sumber-sumber energi alternatif dan atau bahan substitusi yang terbarukan yang lebih ramah lingkungan.
 - e. Mengembangkan potensi sumber daya kelautan. Pembangunan Kabupaten Pulang Pisau dalam 20 tahun ke depan perlu memperhatikan pendayagunaan dan pengawasan wilayah laut yang sangat luas. Karena itu maka arah pemanfaatannya harus dilakukan melalui pendekatan multisektor, integratif dan komprehensif agar dapat



meminimalisasi konflik dan tetap menjaga kelestariannya. Mengingat kompleksnya permasalahan dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir, maka pendekatan keterpaduan dalam kebijakan dan perencanaan menjadi prasyarat utama dalam menjamin keberlanjutan proses ekonomi, sosial dan lingkungan yang terjadi. Selain itu, kebijakan dan pengelolaan pembangunan kelautan harus merupakan keterpaduan antara sektor lautan dan daratan serta menyatu dalam strategi pembangunan nasional sehingga kekuatan darat dan laut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

- f. Peningkatan partisipasi masyarakat akan pentingnya pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup dilakukan melalui pemberdayaan terhadap berbagai institusi sosial dan ekonomi di tingkat lokal, serta pengakuan terhadap hak-hak adat atas SDA termasuk bagi pemerintah daerah.
- g. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam hubungan ini upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menetapkan Kawasan eks. PLG menjadi kawasan khusus perlu didukung oleh seluruh lapisan termasuk masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau.
- h. penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas; sistem politik yang kredibel dalam mengendalikan konflik; SDM yang berkualitas; perluasan penerapan etika



lingkungan; serta asimilasi sosial budaya yang semakin mantap, sehingga lingkungan dapat memberikan kenyamanan dan keindahan dalam kehidupan. Selanjutnya cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan perlu didorong melalui internalisasi ke dalam kegiatan produksi dan konsumsi, dan menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial, serta pendidikan formal pada semua tingkatan.

- i. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup. Kebijakan ini diarahkan terutama bagi generasi muda, sehingga tercipta SDM yang berkualitas yang peduli terhadap isu SDA dan lingkungan hidup. Dengan demikian ke depan mereka mampu berperan sebagai penggerak bagi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

5. Mendorong kehidupan masyarakat yang tertib, taat hukum, dinamis dan demokratis, menghargai nilai-nilai luhur agama dan budaya lokal sebagai bagian dari budaya nasional.

Pembangunan kehidupan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi terus ditingkatkan, dan sehubungan dengan itu pembangunan pada misi ini diarahkan untuk:

- a. Terciptanya kondisi masyarakat yang bermoral dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat



yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Di samping itu, kesadaran akan budaya luhur yang dimiliki Kabupaten Pulang Pisau memberikan arah bagi perwujudan identitas yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya Jawa dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kehidupan.

- b. Kehidupan beragama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan kota, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Disamping itu, pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat kota yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis.
- c. Pembangunan dan pemantapan jatidiri masyarakat Kabupaten Pulang Pisau ditujukan untuk mewujudkan karakter dan sistem sosial yang berakar, unik, modern dan unggul. Jatidiri tersebut merupakan kombinasi antara nilai luhur budaya dayak – seperti religius, kebersamaan dan persatuan – dan nilai modern yang universal – seperti etos



kerja dan prinsip tata pemerintahan yang baik.

- d. Pembangunan jatidiri tersebut dilakukan melalui transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata nilai budaya Jawa yang mempunyai potensi unggul dan menerapkan nilai modern yang membangun.
- e. Budaya inovatif yang berorientasi iptek terus dikembangkan agar warga Kabupaten Pulang Pisau sebagai komponen bangsa Indonesia menguasai iptek serta mampu berjaya di era persaingan global.
- f. Pengembangan budaya iptek tersebut dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi iptek, bersamaan dengan mengarahkan budaya konsumtif menuju budaya produktif. Bentukbentuk pengungkapan kreativitas, antara lain melalui kesenian, tetap didorong untuk mewujudkan keseimbangan aspek material, spiritual dan emosional. Pengembangan iptek serta kesenian diletakkan dalam kerangka peningkatan harkat, martabat dan peradaban manusia.

6. Mewujudkan Tata Pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

Kehidupan Kabupaten Pulang Pisau yang memiliki ketatapemerintahan yang baik,



berkeadilan dan demokratis yang berlandaskan hukum adalah landasan penting untuk tercapainya keberhasilan seluruh proses pelaksanaan pembangunan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan adil. Sehubungan dengan ini pembangunan tata pemerintahan yang baik dan bersih diarahkan untuk:

- a. Menerapkan Akuntabilitas publik merupakan kata kunci menuju terciptanya *good governance* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Sedangkan aturan hukum di tingkat daerah pada dasarnya bermanfaat untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif dari berbagai sisi kehidupan masyarakat dan menghambat aspek negatif dari berbagai sisi kehidupan masyarakat.
- b. Menyempurnakan struktur kelembagaan pemerintah Kabupaten yang dititikberatkan pada proses penataan struktur organisasi agar dapat menjalankan fungsi-fungsi yang diamanatkan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang profesional, efektif, berkompetensi tinggi serta tanggap terhadap tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik.
- c. mewujudkan ketatapemerintahan yang baik melalui beberapa kebijakan antara lain: (a) mempromosikan dan mensosialisasikan pentingnya keberadaan sebuah konstitusi yang kuat dan memiliki kredibilitas tinggi



- sebagai pedoman dasar bagi sebuah proses demokratisasi berkelanjutan; (b) meningkatkan kinerja SOPD dan lembaga penyelenggara pemerintahan daerah dalam menjalankan kewenangan dan fungsi-fungsi yang diberikan oleh peraturan daerah; (c) memantapkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah; (d) menciptakan pelembagaan demokrasi lebih lanjut untuk mendukung berlangsungnya konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan.
- d. Mengembangkan kapasitas pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah: peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah; serta penguatan lembaga legislatif.

4.2.6.2. Telaahan RTRW Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2038

Penelaahan terhadap isu strategis RTRW bertujuan untuk mewujudkan keselarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang telah disusun. Sebelum menelaah struktur dan pola ruang tersebut, maka perlu ditelaah tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Pulang Pisau.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau 2018-2038, tujuan



penataan ruang wilayah adalah Penataan ruang kabupaten Pulang Pisau bertujuan terwujudnya ruang kabupaten Pulang Pisau yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, berbasis pada kegiatan agrobisnis dan agroindustri serta berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagai berikut :

- a. pemerataan pembangunan dalam upaya mengurangi kesenjangan dan keterbelakangan antar daerah di kabupaten;
- b. pengembangan sektor pertanian menuju agribisnis dan agroindustri;
- c. pengembangan sarana dan prasarana wilayah untuk pengembangan ekonomi;
- d. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- e. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Kebijakan tersebut juga dijabarkan kembali kedalam strategi penataan ruang wilayah Kabupaten antara lain;

1. Strategi pemerataan pembangunan dalam upaya mengurangi kesenjangan dan keterbelakangan antar daerah di kabupaten, meliputi;
 - a. membentuk pola dan struktur ruang yang menunjang penyebaran ekonomi;
 - b. mengembangkan kualitas sarana dan prasarana perkotaan;
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budidaya;



- d. mendorong pertumbuhan lapangan pekerjaan; dan
 - e. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pemerataan penyediaan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi.
2. Strategi pengembangan sektor pertanian menuju agribisnis dan agroindustri, meliputi;
- a. mengembangkan produksi komoditas kelapa sawit;
 - b. mengembangkan produksi komoditas kelapa;
 - c. mengembangkan produksi komoditas karet;
 - d. mengembangkan produksi komoditas peternakan;
 - e. mengembangkan produksi komoditas tanaman pangan;
 - f. mengembangkan produksi komoditas perikanan;
 - g. membentuk kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan;
 - h. meningkatkan pengembangan industri berbasis pertanian dengan melengkapi prasarana dan sarana pendukung;
 - i. mengembangkan industri pertambangan dengan tidak mengabaikan keberlangsungan ekosistem lingkungan;
 - j. mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan;



- k. memperkuat pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi norma standar sertifikasi yang dibutuhkan;
 - l. memanfaatkan lahan non produktif secara tepat dan berhasil guna bagi peningkatan ekonomi;
 - m. menguatkan strategi pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan;
 - n. meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
 - o. mengembangkan budaya dan wisata daerah sebagai salah satu tujuan wisata.
3. Strategi pengembangan sarana dan prasarana wilayah untuk pengembangan ekonomi, meliputi;
- a. membangun sarana dan prasarana transportasi darat;
 - b. mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi;
 - c. mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana jaringan air bersih;
 - d. membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana energi;



- e. membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan;
 - f. mengembangkan interaksi kawasan untuk peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan sarana dan prasarana wilayah; dan
 - g. meningkatkan akses kawasan budidaya, khususnya daerah terisolir ke sistem jaringan transportasi melalui peningkatan jalan kabupaten.
4. Strategi peningkatan kualitas lingkungan, meliputi;
- a. menguatkan dan pemulihan fungsi kawasan lindung;
 - b. menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
 - c. melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi hutan lindung yang berbasis masyarakat;
 - d. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - e. menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan lindung; dan
 - f. memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat.



5. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara, meliputi;
 - a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
 - d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

4.2.6.3. Telaahan KLHS Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023

Secara metodologis, Kajian lingkungan hidup strategis di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Rencana pembangunan Daerah Pemerintah daerah menyusun KLHS RPJMD dalam rangka mewujudkan RPJMD sesuai dengan prinsip berkelanjutan.

Hal ini tentu berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan bahwa untuk mencapai sasaran TPB mengarahkan Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan salah satunya Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB Provinsi, sehingga dihasilkan rencana aksi TPB yang terukur dan jelas dalam periode waktu tertentu. Secara umum, maksud pembuatan KLHS RPJMD Kabupaten Pulang Pisau adalah untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis TPB termuat dalam RPJMD Kabupaten Pulang Pisau.

Berdasarkan hasil kajian terhadap beberapa indikator kinerja daerah yang juga menunjang pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) maka rekomendasi yang dihasilkan KLHS antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan penanganan sampah dan pengelolaan sampah terpadu melalui konsep 3R (*reduce, reuse and recycle*).



2. Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, sarana pendidikan dan tenaga pendidik.
3. Penyediaan lapangan pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
4. Mendorong aktifitas ekonomi di berbagai sektor.
5. Peningkatan mutu dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan.
6. Peningkatan, pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani, jembatan usaha tani dan fasilitas pengairan untuk meningkatkan rasio lahan produktif.
7. Peningkatan Pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi daerah dengan target pertumbuhan produk domestik bruto mencapai 7 persen per tahun.

Terkait dengan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan bahwa indikator TPB di Kabupaten Pulang Pisau yang telah dilaksanakan dan mencapai target baru mencapai 39 indikator atau 29,10 % dari total 134 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten. Berikut komposisi secara keseluruhan terhadap



capaian TPB di Pulang Pisau disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Capaian Indikator TPB Kabupaten Pulang Pisau Terhadap Target Nasional

No.	Kriteria	Jumlah Indikator	Persentase
1	2	3	4
1.	Indikator yang telah dilaksanakan dan mencapai target nasional	39 Indikator	29,10%
2.	Indikator yang telah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional	66 Indikator	49,25%
3.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional	15 Indikator	11,19%
4.	Data tidak tersedia	14 Indikator	10,45%
Total indikator yang menjadi urusan dan kewenangan Kabupaten Pulang Pisau		134 indikator	100%

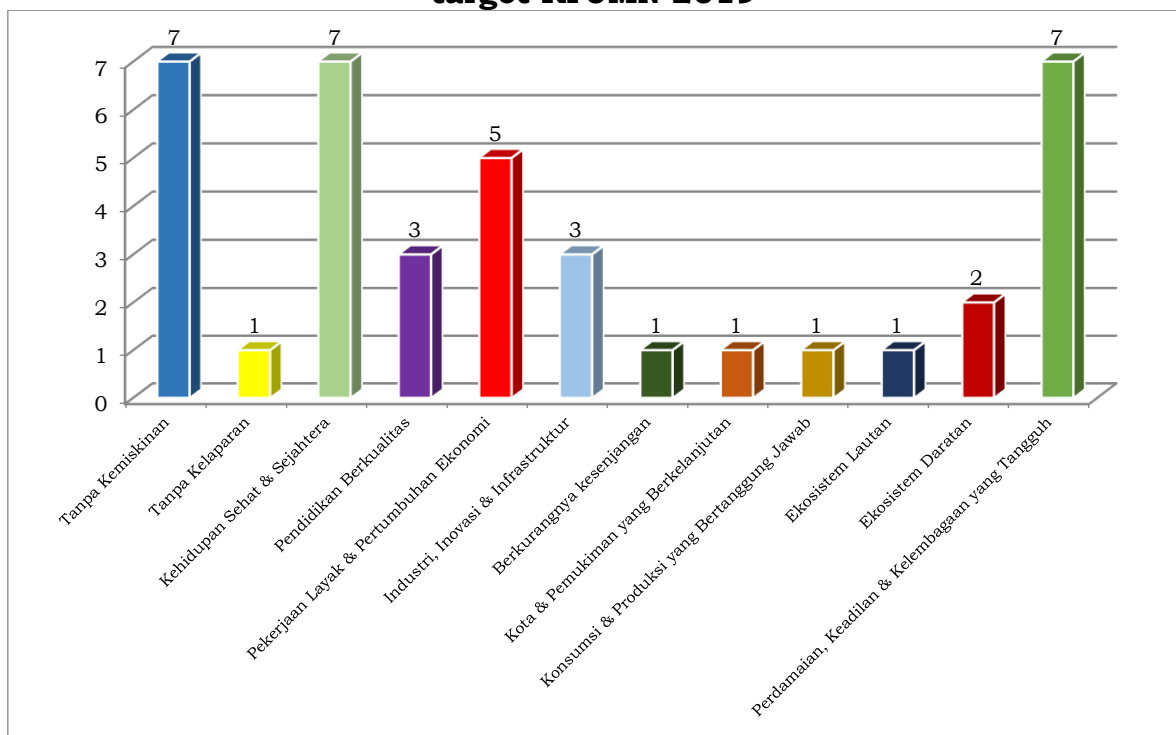
Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Pulang Pisau 2018-2023

Berikut ini disajikan penjelasan capaian TPB yang sudah tercapai dan belum tercapai berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Pulang Pisau 2018-2023 sebagai berikut : Secara keseluruhan yang masuk dalam kategori ini sebanyak 39 indikator atau 29,10% dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan provinsi. Capaian paling tinggi dicapai oleh TPB 1 yaitu tanpa kemiskinan dan TPB 3 yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, serta TPB 16 yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh masing-masing sebanyak 7 indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target. Sedangkan pencapaian terbesar selanjutnya adalah TPB 8 yaitu

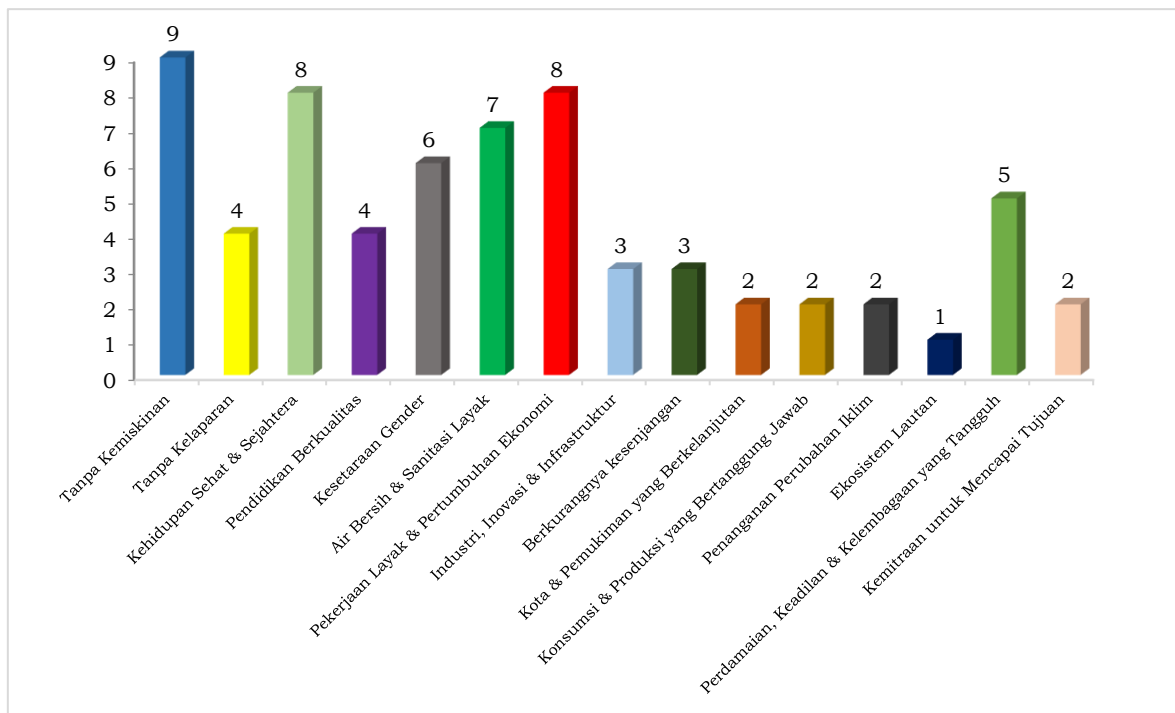


pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi 5 indikator, tujuan 4 pendidikan berkualitas dan tujuan 6 industri inovasi masing-masing 3 indikator. Berikut grafik indikator capaian masing-masing tujuan yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target.

Bagan 4.1
Jumlah Indikator yang telah dilaksanakan dan telah mencapai target RPJMN 2019



Bagan 4.2
Jumlah Indikator yang telah dilaksanakan dan Belum mencapai target RPJMN 2019



4.2.6.4 Telaahan RPJMD Daerah Lain

Proses perumusan isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Pulang Pisau selain memperhatikan berbagai dokumen atau isu yang telah dibahas diatas, juga memperhatikan RPJMD daerah lain di sekitar Kabupaten Pulang Pisau. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan Daerah lainnya dilakukan dengan menelaah dampak pembangunan yang saling berpengaruh terhadap Daerah lain dan harus dijabarkan dalam dokumen perencanaan. Penelaahan terhadap RPJMD Daerah lain dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah dengan daerah lainnya.



Identifikasi RPJMD daerah lain dilakukan terhadap kabupaten/kota yang berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau, meliputi: Kabupaten Kapuas, Kabupaten Gunung Mas, Kota Palangkaraya, dan Kabupaten Katingan. Telaahan ini disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Identifikasi RPJMD Daerah Lain
Kabupaten Pulang Pisau

No 1	Daerah Lain 2	Periode RPJMD 3	Kebijakan Terkait 4
1	Kabupaten Gunung Mas	2014-2019	Visi : Gunung Mas Bersinar Berdaya Saing, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat Misi: 1. Meningkatkan kualitas, relevansi dan akses perangkat pendidikan dan layanan kesehatan. 2. Meningkatkan pemberdayaan dan daya saing ekonomi rakyat. 3. Melanjutkan dan memantapkan pembangunan infrastruktur pembuka isolasi daerah secara adil dan proporsional. 4. Meningkatkan layanan pemerintahan secara lebih berkualitas, cepat, transparan dan akuntabel, pada semua tingkatan pemerintahan. 5. Meningkatkan ketersediaan energi untuk rakyat. 6. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, melalui penguatan keterkaitan dan relevansi antara pengembangan perangkat pendidikan dengan investasi



No 1	Daerah Lain 2	Periode RPJMD 3	Kebijakan Terkait 4
			daerah. 7. Meningkatkan pengendalian, pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam secara serasi, seimbang dan lestari.
2	Kabupaten Katingan	2018-2023	Visi : Katingan Bermartabat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera
			Misi 1. Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif serta mewujudkan supremasi hukum. 2. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan kemandirian pangan. 3. Memantapkan pembangunan perdesaan. 4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan serta keluarga berencana dan kesetaraan gender. 5. Peningkatan infrastruktur fisik jalan dan jembatan, jaringan air bersih, dan komunikasi. 6. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkesinambungan 7. Membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa gotong royong serta harmonisasi antar lapisan masyarakat dalam hetrogenitas agama, suku, adat istiadat, dan sosial budaya.
			Arah Kebijakan yang Terkait Pembangunan



No 1	Daerah Lain 2	Periode RPJMD 3	Kebijakan Terkait 4
			Kabupaten Pulang Pisau: 1. Pembinaan, pemantuan dan pengawasan pencemaran dan pengrusakan lingkungan, termasuk limbah B3. 2. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam 3. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 4. Pengendalian kebakaran hutan. 5. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. 6. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi laut dan hutan.
3	Kota Palangka Raya	2013-2018	Visi : Terwujudnya Kota Palangka Raya menjadi kota yang maju, Rukun, dan Sejahtera Semu
			Misi: 1. Mewujudkan kemajuan Kota Palangka Raya <i>Smart Enviromental</i> (Lingkungan Cerdas). 2. Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat <i>Smart Society</i> (Masyarakat Cerdas) 3. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat kota dan masyarakat Daerah pinggiran <i>Smart Economy</i> (Ekonomi Cerdas)
4	Kabupaten Kapuas	2018-2023	Visi : Terwujudnya Kabupaten Kapuas Yang Lebih Maju, Sejahtera Dan Mandiri Melalui Pembangunan Yang Adil Dan Merata Serta Berkelanjutan
			Misi : 1. Mempercepat pembangunan



No 1	Daerah Lain 2	Periode RPJMD 3	Kebijakan Terkait 4
			peningkatan jalan, jembatan, irigasi, jalan desa, jalan usaha tani, pelabuhan, terminal, pasar, listrik, air bersih, perumahan dan kawasan permukiman layak huni, jaringan komunikasi serta infrastruktur lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian kerakyatan. 2. Meningkatkan usaha pertanian masyarakat yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, dengan melibatkan para petani lokal dan transmigrasi dengan semangat kebersamaan sesuai falsafah Huma Betang 3. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memberikan kemudahan kepada dunia usaha serta tetap memperhatikan hak masyarakat. 4. Memberikan kepastian hukum bagi investor dalam berinvestasi. 5. Mengoptimalkan dan mewujudkan kemitraan antara pemerintah, pengusaha atau pihak ketiga dan masyarakat secara harmonis yang saling menguntungkan 6. Melindungi, menghargai dan mengakui tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah, bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas melalui kelembagaan adat Dayak 7. Meningkatkan peran perusahaan daerah untuk mendorong perekonomian



No 1	Daerah Lain 2	Periode RPJMD 3	Kebijakan Terkait 4
			masyarakat dan daerah guna terwujudnya pertumbuhan ekonomi untuk terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat 8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar, sarana dan prasarana pendidikan di semua jenjang untuk memberikan kesempatan kepada semua golongan masyarakat memperoleh pendidikan bermutu dengan menyelenggarakan pendidikan gratis 12 tahun pada tingkat SD/Madrasah Ibtidaiyah, SLTP/Madrasah Tsanawiyah, SLTA/Madrasah Aliyah, baik negeri maupun swasta serta memberikan beasiswa 9. Mengembangkan dan mendorong peningkatan pendidikan keterampilan bagi kaum wanita, kelompok pemuda, remaja putus sekolah, penyandang cacat melalui kemitraan dan balai latihan kerja untuk meraih kehidupan yang lebih baik. 10. Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang mudah, murah, adil dan merata serta pembangunan fasilitas kesehatan, penempatan tenaga kesehatan, penyediaan obat-obatan, dan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. 11. Meningkatkan pembinaan kegiatan kepemudaan, kepramukaan, olah



No 1	Daerah Lain 2	Periode RPJMD 3	Kebijakan Terkait 4
			raga, seni budaya serta pengembangan pariwisata 12. Meningkatkan peran dan fungsi kepala desa, perangkat desa, RT/RW, guru agama, guru ngaji, guru sekolah minggu, damang, mantir, basir, pemangku agama hindu, pedanda serta memberikan insentif 13. Meningkatkan kerukunan, kedamaian, keimanan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras dan golongan dengan melibatkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, LSM serta komunitas masyarakat lainnya 14. Mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan prima, dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas dan kerja tuntas, dengan meningkatkan kesejahteraan PNS, tenaga kesehatan dan guru non PNS, penyediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas, serta pemberian insentif.

4.2.7 Isu Strategis Kabupaten Pulang Pisau

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan, dinamika isu atau kebijakan yang berkembang di lingkungan internasional, nasional, provinsi dan di tingkat Kabupaten Pulang Pisau, maka berikut ini rumusan isu strategis pembangunan Kabupaten Pulang Pisau;

1. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah



2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan
3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik
4. Peningkatan Perekonomian Masyarakat yang berpihak kepada pengembangan Koperasi, UMKM dan Sektor Pariwisata
5. Peningkatan kualitas Pendidikan Masyarakat
6. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
7. Peningkatan Peran Pemuda dan Perempuan dalam pembangunan
8. Peningkatan Kemandirian Ekonomi daerah
9. Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan